

## DAFTAR PUSTAKA

- BBC, *Organisasi Papua Merdeka Yang Menuntut Pemisahan Papua Dari Indonesia, Apa dan Siapa Mereka?* diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502> Pada 13 Januari 2021.
- BBC, *Polisi Sebut Kelompok Bersenjata Papua Bunuh 20 Orang Sepanjang 2019, OPM Anggap Diskriminatif.* diakses dari: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50939005> Pada 18 Januari 2021.
- Djamily, M., (1988). *Mengenal PBB dan 170 Negara di Dunia*. Kreasi Jaya Utama. Jakarta. hlm.10.
- Erni Eliza, H.A., (2014). *Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervension) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.4, ISSN 1978-5186, Lampung, hlm. 634
- Haryomataram, (1994). *Hukum Humaniter*. Radjawali. Jakarta. hlm. 2-3.
- Ismail, I., (2013). *Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi Tentang Urgensi dan Prosedur Ratifikasi)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.3, ISSN 2407-6562, Purwokerto, hlm.368.
- Jawahir Thontowi, P.I., (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. PT.Refika Aditama. Bandung. hlm.226.
- Kompas, n.d. *Daftar Negara Anggota PBB*. diakses dari: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/05/213000469/daftar-negara-anggota-pbb> Pada 18 Januari 2021.
- Kompas, n.d. *Dewan Keamanan PBB: Fungsi, Tugas dan Anggota*. diakses dari: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/05/234500669/dewan-keamanan-pbb--fungsi-tugas-dan-anggota?page=all> Pada 13 Januari 2021.
- M. Yusuf al-Qardhawy, M.A.M.N.R., (2014). *Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka dan Memorandum of Understanding Helsinki Menurut Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol.2, No.2, ISSN 2302-0180, Aceh, hlm.37.
- Mongabay, n.d. *Pembangunan Infrastruktur di Papua, Mengapa Penting Dilakukan*. diakses dari: <http://www.mongabay.co.id/2017/11/07/pembangunan-infrastruktur-di-papua-mengapa-penting-dilakukan/> Pada 19 Januari 2021.

- Muchtar, H., (2015). *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*. Humanu: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora, Vol.14,No.1, ISSN : 1410-8062, Padang, hlm.84.
- Pigai, N., (2014). *Solusi Damai di Tanah Papua (Mengubur Tragedi HAM dan Mencari Jalan Kedamaian)*. Jurnal Administrasi Publik, Vol.11,No.2, ISSN 1412-7040, Bandung, hlm.31
- Protokol Tambahan II 1977 Pasal 1 Tentang Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan Dengan Angkatan Perang Pemberontak dan Kelompok Bersenjata Pemberontak.
- Protokol Tambahan II 1977 Pasal 3 Tentang Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan Intervensi Negara Lain Terkait Pemberontakan.
- R.Soesilo, (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Raweyai, Y.T.H., (2002). *Mengapa Papua Ingin Merdeka*. Presidium Dewan Papua. Jayapura.
- Rhona K M, S.d., (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII. Yogyakarta. hlm.244.
- Sefriani, (2016). *Separatisme Dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka*. UNISIA, Vol.26 No.47, ISSN : 0215-1421, Jakarta, hlm.41
- Soekanto, S., (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta. hlm.12.
- Trijono, L., (2009). *Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik Di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan dan Demokrasi Dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca-Konflik*. JSP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.13, No.1, ISSN 1410-4946, Yogyakarta, hlm.50.
- Yudi, L., (2011). *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*. Gramedia. Jakarta. hlm.548.
- Wicipto Setiadi, Iwan Joesoef erar, Muhammad Helmi Fahrozi, (2020), *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengimplementasikan Nilai Pancasila Untuk Menghadapi Globalisasi dan era Industri 4.0*, Jurnal Papatung, Vol.3, No. 1, ISSN : 2715-0186. Jakarta,hlm.60